

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

NOTA DINAS

NOMOR: W.29.UM.01.01-2800

Yth. : Kepala Kantor Wilayah
Para Kepala Divisi
Para Pejabat Administrasi

Dari : Kepala Divisi Administrasi

Hal : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Montoring dan Evaluasi Realisasi
Anggaran Triwulan I dan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran
Periode Semester I TA. 2022

Lampiran : -

Tanggal : 1 Juli 2022

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Triwulan I dan pelaksanaan realisasi anggaran periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 4 Juli 2022

Pukul : 10.00 WIT – selesai

Tempat : Ruang Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Maluku Utara

Agenda : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi
Realisasi Anggaran Triwulan I dan Monitoring dan Evaluasi
Realisasi Anggaran Periode Semester I TA. 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



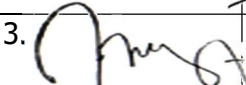
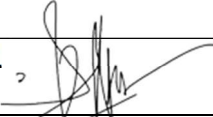
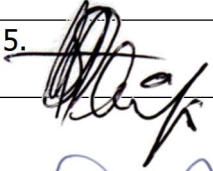

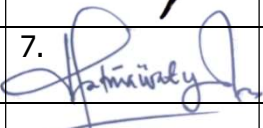

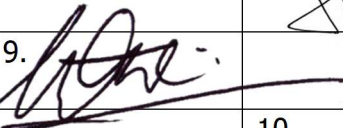
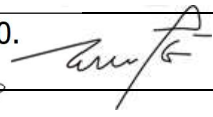
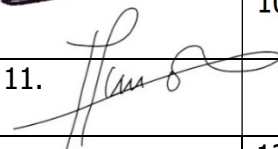
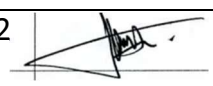
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Jl. CengkehAfo No. 40 Ternate

Telepon : (0921)3122119 Faksimile : (0921) 3122118

Website :www.malut.kemenkumham.go.id - E-mail : kuper.malut@kemenkumham.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I
DAN MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
SENIN, 04 JULI 2022**

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	M. ADNAN	KEPALA KANTOR WILAYAH	1. 	
2	ANDI BASMAL	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI		2. 
3	M. KASIM UMASANGADJI	KEPALA BAGIAN UMUM	3. 	
4	IRWAN KADIR	KABAG PROGRAM DAN HUMAS		4. 
5	SARWEDI SIREGAR	KABID HUKUM	5. 	
6	ZULFIKAR GAILEA	KABID PELAYANAN HUKUM		6. 
7	FATMAWATY BAUD	KASUBAG PENG.KEUANGAN	7. 	
8	BURHANI HADAD	KASUBAG P2		8. 
9	MOHAMMAD IKBAL	KASUBID FPPHD	9. 	
10	SAMSUDIN BUTON	KASUBID PENGELOLAAN		10. 
11	ERNI RUMASORENG	KASUBID PENGKAJIAN	11. 	
12	ERMIN RASYIM	KASUBID HUMAS		12. 

Ternate, 04 Juli 2022

Kepala Divisi Administrasi



Andi Basmal

NIP. 9720215 199203 1 002

**DOKUMENTASI RAPAT TINDAK LANJUT REKOMENDASI
MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I DAN MONITORING DAN
EVALUASI REALISASI ANGGARAN SEMESTER I DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA SENIN, 04 JULI 2022**





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Jalan Cengkeh Afo No. 40 Ternate

Telepon : (0921) 3122119, Faksimili : (0921) 3122118

Laman : www.malut.kemenkumham.go.id e-mail : kuper.malut@gmail.com

NOTULA

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Juli 2022
Pukul : 10.00 WIT
Tempat : Aula Kantor Wilayah

Peserta Rapat

- a. Hadir :
1. M. Adnan
 2. Andi Basmal
 3. M. Kasim Umasangadji
 4. Irwan Kadir
 5. Zulfikar Gailea
 6. Sarwedi Siregar
 7. Fatmawaty Baud
 8. Burhani Hadad
 9. Erni Rumasoreng
 10. Mohammad Ikbal
 11. Samsudin Buton

Acara : Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I dan Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2022

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka pukul 10.00 WIT yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan pembahasan hasil realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode Semester I Tahun Anggaran 2022.

Jalannya rapat/pertemuan:

- 1) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I:
 - Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Triwulan I yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2022, terdapat tiga satuan kerja yang belum mencapai target realisasi anggaran Triwulan I, yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas III Labuha, Direktorat Jenderal AHU, dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

- Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan belanja, khususnya belanja barang di periode Triwulan II.
 - Realisasi belanja barang yang cukup kecil pada Lembaga Pemsayarakatan Kelas III Labuha sebesar 12,84% menyebabkan penyerapan anggaran pada Lembaga Pemsayarakatan Kelas III Labuha tidak mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu Upaya Tindak Lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran dengan memaksimalkan belanja barang untuk periode berikutnya. Lembaga Pemsayarakatan Kelas III Labuha telah melaksanakan tindak lanjut monitoring dan evaluasi dengan baik, sehingga penyerapan anggaran periode Triwulan II meningkat menjadi 48,82%.
 - Direktorat Jenderal AHU telah melakukan upaya tindak lanjut dengan baik. Penyerapan anggaran semula pada Triwulan I sebesar 14,87% berhasil dioptimalkan pada Triwulan II sebesar 50,48%.
 - Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas III Ternate terdapat pada pelaksanaan belanja modal. Upaya tindak lanjut yang harus dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan belanja modal pada periode berikutnya. Pada pelaksanaannya, Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas III Ternate telah melakukan proses konsultasi terkait penyelesaian pembangunan gedung dan bangunan. Namun, dikarenakan pembayarannya dilakukan bertahap, penyerapan anggarannya pun menyesuaikan dengan tagihan pembayaran. Hingga Triwulan II, Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas III Ternate masih belum mencapai target yang ditentukan.
- 2) Hasil pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode Semester I:
- Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara senilai Rp47.059.153.504 dari total PAGU Anggaran Rp98.467.785.000, dengan persentase 47,79%.
 - Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi anggaran di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menempati peringkat ketiga setelah Kantor Wilayah Sulawesi Selatan (48,21%) dan Kantor Wilayah Sumatera Barat (47,88%).
 - Realisasi anggaran untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara senilai Rp10.405.673.509 dari total PAGU Anggaran Rp20.829.495.000, dengan persentase 49,96%.
 - Sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, target realisasi anggaran untuk periode Semester I adalah 50%. Persentase ini merupakan persentase kumulatif dari realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
 - Berdasarkan hasil rekapitulasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per 30 Juni 2022, satuan kerja dengan realisasi tertinggi dicapai oleh Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate (64,88%). Kemudian, dua satuan kerja dengan nilai realisasi terendah yaitu, Direktorat Jenderal Pemsayarakatan (40,81%), dan Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Kelas III Ternate (25,04%).

- Satuan kerja Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate memiliki PAGU sebesar Rp2.171.796.000 dengan persentase penyerapan sebesar Rp1.409.004.687 (64,88%). Penyerapan Anggaran pada setiap jenis belanja pada RUPBASAN Ternate telah melebihi target yang ditentukan (50%). Ini merupakan pencapaian yang sangat baik atas realisasi anggaran satuan kerja.
 - Satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki PAGU sebesar Rp1.027.254.000 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp419.244.900 (40,81%). Dibandingkan dengan 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, hanya satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan tidak mencapai target penyerapan semester I.
 - Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate memiliki total PAGU sebesar Rp10.368.064.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.595.720.242 (25,04%). Realisasi belanja modal yang baru mencapai 6,08% membuat penyerapan anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate belum maksimal.
- 3) Sesi Tanya/Jawab atas hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan untuk menjawab faktor yang menyebabkan terjadinya kendala yang dihadapi.
- Realisasi belanja pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate sudah sangat baik, namun diharapkan tetap memerhatikan anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar tidak terdapat PAGU Minus dan Deviasi Halaman III DIPA yang lebih dari 5%.
 - Realisasi belanja barang pada satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum mencapai target minimum penyerapan sebesar 40,81%. Hal ini dikarenakan terdapat banyak PAGU yang masih diblokir, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran *stagnan*. Belum ada informasi lebih lanjut dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan terkait buka blokir anggaran. Jika belum dilakukan blokir, maka satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan memaksimalkan kegiatan hingga Triwulan III.
 - Realisasi belanja modal pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate memiliki *gap* yang cukup besar terhadap target yang ditentukan. PAGU belanja modal pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate sebesar Rp5.916.050.000, sementara realisasinya hanya 6,80% atau sebesar Rp402.001.396. Belanja modal ini terkait dengan penyelesaian pembangunan gedung/bangunan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Apabila proses pelaksanaan pembangunan gedung/bangunan telah dimulai, diharapkan penyerapan anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Ternate dapat mencapai target yang ditentukan.
- 4) Simpulan/Rekomendasi
- Hasil pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara belum mencapai target yang ditentukan, namun menduduki peringkat ketiga realisasi anggaran seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - Setiap satuan kerja harus memerhatikan penyerapan anggaran per jenis belanja dan mendukung belanja berkualitas melalui peningkatan kualitas

pelaksanaan anggaran dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun.

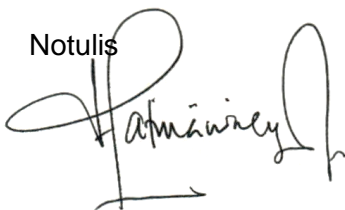
- Satuan kerja diharapkan melakukan penyusunan rencana kegiatan periode Triwulan III kemudian melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA.
- Sesuai dengan PER-5/PB/2022, batas waktu pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2022 adalah tanggal 14 Juli 2022.
- Target realisasi anggaran Triwulan III Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebesar 75%.
- RPD Halaman III DIPA bulan Januari-Juni sesuai dengan realisasi anggaran per jenis belanja. RPD Halaman III DIPA bulan Juli-September sesuai rencana belanja per jenis belanja, dengan memerhatikan target realisasi anggaran triwulan III, yaitu: Belanja Pegawai sebesar 75%, Belanja Barang sebesar 70%, dan Belanja Modal sebesar 70%.

5) Saran/Masukan

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka perlu segera dilaksanakan tindak lanjut pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Demikian rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan serta untuk segera dilakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Realisasi Anggaran periode Semester I Tahun Anggaran 2022 yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi periode (triwulan) berikutnya. Acara ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah pada pukul 12.00 WIT.

Notulis



Fatmawaty Baud, S.E.
NIP. 19800724 200912 2 005



Disahkan Oleh,
Kepala Divisi Administrasi

Indi Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

NOTA DINAS

NOMOR: W.29.UM.01.01-2825

Yth. : Kepala Kantor Wilayah
Dari : Kepala Divisi Administrasi
Hal : Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2022
Lampiran : 1 Laporan
Tanggal : 5 Juli 2022

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2022 pada hari selasa tanggal 4 Juli 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pokok surat, untuk mohon petunjuk dan arahan Bapak.

Demikian disampaikan, atas perkenanan Bapak Kepala Kantor Wilayah, kami ucapkan terima kasih.



Andi Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
Jalan Cengkeh Afo No. 40 Ternate
Telepon : (0921) 3122119, Faksimili : (0921) 3122118
Laman : www.malut.kemenkumham.go.id e-mail : kuper.malut@gmail.com

**LAPORAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PERIODE SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. Pendahuluan

1. Umum

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan prima serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Salah satu bentuk sistem penyelenggaraan organisasi yang akuntabel adalah dengan memastikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran merupakan perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran terhadap pelaksanaan anggaran setiap bulannya dalam periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang telah ditentukan dalam periode Semester I Tahun Anggaran 2022, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan pada periode triwulan berikutnya. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan berkelanjutan dan berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan

untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi anggaran periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah memantau setiap pelaksanaan anggaran oleh pimpinan secara berkala setiap bulannya selama periode Semester I Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

C. Hasil yang Dicapai

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi periode Semester I Tahun Anggaran 2022, hasil yang dicapai yaitu:

1) Realisasi Anggaran periode Bulan Januari Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 31 JANUARI 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	121.662.132	10,25%	834.381.000	62.600.000	7,50%	150.000.000	-	0,00%	2.171.796.000	184.262.132	1.987.533.868	8,48%
2	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	162.931.282	9,20%	1.826.908.000	64.230.000	3,52%	150.000.000	-	0,00%	3.747.451.000	227.161.282	3.520.289.718	6,06%
3	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	181.683.908	6,25%	2.579.133.000	64.296.678	2,49%	145.765.000	13.254.548	9,09%	5.632.688.000	259.235.134	5.373.452.866	4,60%
4	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	140.910.803	7,38%	1.360.737.000	5.700.000	0,42%	150.000.000	-	0,00%	3.419.971.000	146.610.803	3.273.360.197	4,29%
5	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	167.834.099	6,36%	1.507.204.000	2.279.280	0,15%	150.000.000	-	0,00%	4.296.919.000	170.113.379	4.126.805.621	3,96%
6	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	70.204.781	10,11%	1.245.000.000	-	0,00%	150.000.000	-	0,00%	2.089.184.000	70.204.781	2.018.979.219	3,36%
7	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	127.581.028	7,24%	2.070.896.000	4.990.000	0,24%	150.000.000	-	0,00%	3.982.205.000	132.571.028	3.849.633.972	3,33%
8	649022 KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN)	7.217.651.000	430.465.397	5,96%	5.917.838.000	13.938.353	0,24%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	444.403.750	12.995.475.250	3,31%
9	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	150.538.728	5,47%	2.661.996.000	26.592.000	1,00%	150.000.000	-	0,00%	5.562.628.000	177.130.728	5.385.497.272	3,18%
10	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	168.329.436	5,59%	2.496.770.000	-	0,00%	150.000.000	-	0,00%	5.660.150.000	168.329.436	5.491.820.564	2,97%
11	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	111.469.181	4,09%	1.533.160.000	13.410.858	0,87%	150.000.000	-	0,00%	4.406.251.000	124.880.039	4.281.370.961	2,83%
12	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	217.615.358	5,83%	4.780.633.000	19.655.700	0,41%	130.000.000	-	0,00%	8.643.231.000	237.271.058	8.405.959.942	2,75%
13	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	58.140.647	5,98%	1.225.857.000	-	0,00%	150.000.000	-	0,00%	2.348.371.000	58.140.647	2.290.230.353	2,48%
14	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	214.035.250	7,57%	5.700.213.000	-	0,00%	1.399.631.000	-	0,00%	9.926.119.000	214.035.250	9.712.083.750	2,16%
15	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	165.583.173	5,73%	1.564.213.000	-	0,00%	5.916.050.000	-	0,00%	10.368.064.000	165.583.173	10.202.480.827	1,60%
16	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	79.095.306	5,58%	3.816.718.000	-	0,00%	148.400.000	-	0,00%	5.383.262.000	79.095.306	5.304.166.694	1,47%
17	649023 KANWIL MALUKU UTARA (AHU)	-	-	-	2.031.284.000	26.412.654	1,30%	-	-	-	2.031.284.000	26.412.654	2.004.871.346	1,30%
18	649025 KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI)	-	-	-	1.462.670.000	9.042.370	0,62%	-	-	-	1.462.670.000	9.042.370	1.453.627.630	0,62%
19	649026 KANWIL MALUKU UTARA (KI)	-	-	-	913.609.000	4.980.000	0,55%	-	-	-	913.609.000	4.980.000	908.629.000	0,55%
20	649029 KANWIL MALUKU UTARA (BPHN)	-	-	-	1.199.068.000	4.980.000	0,42%	-	-	-	1.199.068.000	4.980.000	1.194.088.000	0,42%
21	649030 KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG)	-	-	-	235.670.000	-	0,00%	-	-	-	235.670.000	-	235.670.000	0,00%
22	649024 KANWIL MALUKU UTARA (PAS)	-	-	-	1.027.254.000	-	0,00%	-	-	-	1.027.254.000	-	1.027.254.000	0,00%
23	649028 KANWIL MALUKU UTARA (HAM)	-	-	-	273.061.000	-	0,00%	-	-	-	273.061.000	-	273.061.000	0,00%
24	649027 KANWIL MALUKU UTARA (PP)	-	-	-	247.000.000	-	0,00%	-	-	-	247.000.000	-	247.000.000	0,00%
TOTAL		40.412.276.000	2.568.080.509	6,35%	48.511.273.000	323.107.893	0,67%	9.544.236.000	13.254.548	0,14%	98.467.785.000	2.904.442.950	95.563.342.050	2,95%

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

21 Maret 2022 pukul 15.25 WIT

2) Realisasi Anggaran periode Bulan Februari Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 28 FEBRUARI 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	216.857.894	18,26%	834.381.000	139.315.000	16,70%	150.000.000	-	0,00%	2.171.796.000	356.172.894	1.815.623.106	16,40%
2	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	409.930.874	14,10%	2.579.133.000	282.396.165	10,95%	145.765.000	145.485.936	99,81%	5.632.688.000	837.812.975	4.794.875.025	14,87%
3	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	385.674.960	14,61%	1.507.204.000	132.475.170	8,79%	150.000.000	42.000.000	28,00%	4.296.919.000	560.150.130	3.736.768.870	13,04%
4	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	318.132.364	17,97%	1.826.908.000	167.421.981	9,16%	150.000.000	-	0,00%	3.747.451.000	485.554.345	3.261.896.655	12,96%
5	649026 KANWIL MALUKU UTARA (KI)	-	-	-	913.609.000	118.218.000	12,94%	-	-	-	913.609.000	118.218.000	795.391.000	12,94%
6	649027 KANWIL MALUKU UTARA (PP)	-	-	-	247.000.000	30.659.000	12,41%	-	-	-	247.000.000	30.659.000	216.341.000	12,41%
7	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	311.281.214	16,30%	1.360.737.000	80.519.000	5,92%	150.000.000	-	0,00%	3.419.971.000	391.800.214	3.028.170.786	11,46%
8	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	250.132.806	9,19%	1.533.160.000	155.625.230	10,15%	150.000.000	72.859.000	48,57%	4.406.251.000	478.617.036	3.927.633.964	10,86%
9	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	128.791.705	18,55%	1.245.000.000	68.300.000	5,49%	150.000.000	29.834.881	19,89%	2.089.184.000	226.926.586	1.862.257.414	10,86%
10	649028 KANWIL MALUKU UTARA (HAM)	-	-	-	273.061.000	29.590.000	10,84%	-	-	-	273.061.000	29.590.000	243.471.000	10,84%
11	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	196.638.903	13,87%	3.816.718.000	354.156.573	9,28%	148.400.000	-	0,00%	5.383.262.000	550.795.476	4.832.466.524	10,23%
12	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	365.075.394	13,27%	2.661.996.000	196.907.649	7,40%	150.000.000	-	0,00%	5.562.628.000	561.983.043	5.000.644.957	10,10%
13	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	430.231.035	15,22%	5.700.213.000	570.784.699	10,01%	1.399.631.000	-	0,00%	9.926.119.000	1.001.015.734	8.925.103.266	10,08%
14	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	517.336.438	13,86%	4.780.633.000	327.060.708	6,84%	130.000.000	11.000.000	8,46%	8.643.231.000	855.397.146	7.787.833.854	9,90%
15	649030 KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG)	-	-	-	235.670.000	22.189.000	9,42%	-	-	-	235.670.000	22.189.000	213.481.000	9,42%
16	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	367.853.606	12,21%	2.496.770.000	150.179.295	6,01%	150.000.000	-	0,00%	5.660.150.000	518.032.901	5.142.117.099	9,15%
17	649022 KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN)	7.217.651.000	941.534.513	13,04%	5.917.838.000	262.267.199	4,43%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	1.203.801.712	12.236.077.288	8,96%
18	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	254.702.045	14,46%	2.070.896.000	101.702.545	4,91%	150.000.000	-	0,00%	3.982.205.000	356.404.590	3.625.800.410	8,95%
19	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	153.627.948	15,80%	1.225.857.000	10.000.000	0,82%	150.000.000	-	0,00%	2.348.371.000	163.627.948	2.184.743.052	6,97%
20	649024 KANWIL MALUKU UTARA (PAS)	-	-	-	1.027.254.000	66.791.600	6,50%	-	-	-	1.027.254.000	66.791.600	960.462.400	6,50%
21	649029 KANWIL MALUKU UTARA (BPHN)	-	-	-	1.199.068.000	65.261.000	5,44%	-	-	-	1.199.068.000	65.261.000	1.133.807.000	5,44%
22	649025 KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI)	-	-	-	1.462.670.000	77.066.170	5,27%	-	-	-	1.462.670.000	77.066.170	1.385.603.830	5,27%
23	649023 KANWIL MALUKU UTARA (AHU)	-	-	-	2.031.284.000	99.032.654	4,88%	-	-	-	2.031.284.000	99.032.654	1.932.251.346	4,88%
24	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	379.967.346	13,16%	1.564.213.000	64.038.370	4,09%	5.916.050.000	2.200.000	0,04%	10.368.064.000	446.205.716	9.921.858.284	4,30%
TOTAL		40.412.276.000	5.627.769.045	13,93%	48.511.273.000	3.571.957.008	7,36%	9.544.236.000	303.379.817	3,18%	98.467.785.000	9.503.105.870	88.964.679.130	9,65%

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

21 Maret 2022 pukul 15.26 WIT

3) Realisasi Anggaran periode Bulan Maret Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 31 MARET 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	649028 KANWIL MALUKU UTARA (HAM)	-	-	-	273.061.000	75.210.000	27,54%	-	-	-	273.061.000	75.210.000	197.851.000	27,54%
2	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	320.339.143	26,98%	834.381.000	252.425.000	30,25%	150.000.000	-	0,00%	2.171.796.000	572.764.143	1.599.031.857	26,37%
3	649030 KANWIL MALUKU UTARA (BALITBANG)	-	-	-	235.670.000	61.463.450	26,08%	-	-	-	235.670.000	61.463.450	174.206.550	26,08%
4	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	472.505.846	26,69%	1.826.908.000	314.720.256	17,23%	150.000.000	149.796.044	99,86%	3.747.451.000	937.022.146	2.810.428.854	25,00%
5	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	594.403.291	22,52%	1.507.204.000	314.713.438	20,88%	150.000.000	149.800.000	99,87%	4.296.919.000	1.058.916.729	3.238.002.271	24,64%
6	649026 KANWIL MALUKU UTARA (KI)	-	-	-	913.609.000	222.217.600	24,32%	-	-	-	913.609.000	222.217.600	691.391.400	24,32%
7	649027 KANWIL MALUKU UTARA (PP)	-	-	-	247.000.000	58.678.000	23,76%	-	-	-	247.000.000	58.678.000	188.322.000	23,76%
8	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	186.352.629	26,84%	1.245.000.000	160.172.000	12,87%	150.000.000	149.734.881	99,82%	2.089.184.000	496.259.510	1.592.924.490	23,75%
9	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	305.052.524	21,51%	3.816.718.000	799.327.861	20,94%	148.400.000	116.595.000	78,57%	5.383.262.000	1.220.975.385	4.162.286.615	22,68%
10	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	631.738.630	21,73%	2.579.133.000	478.411.897	18,55%	145.765.000	145.485.936	99,81%	5.632.688.000	1.255.636.463	4.377.051.537	22,29%
11	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	478.304.328	25,05%	1.360.737.000	252.797.100	18,58%	150.000.000	-	0,00%	3.419.971.000	731.101.428	2.688.869.572	21,38%
12	649024 KANWIL MALUKU UTARA (PAS)	-	-	-	1.027.254.000	218.225.900	21,24%	-	-	-	1.027.254.000	218.225.900	809.028.100	21,24%
13	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	778.698.484	20,86%	4.780.633.000	801.680.858	16,77%	130.000.000	129.339.016	99,49%	8.643.231.000	1.709.718.358	6.933.512.642	19,78%
14	649029 KANWIL MALUKU UTARA (BPHN)	-	-	-	1.199.068.000	236.548.500	19,73%	-	-	-	1.199.068.000	236.548.500	962.519.500	19,73%
15	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	383.739.438	14,09%	1.533.160.000	334.330.818	21,81%	150.000.000	149.859.000	99,91%	4.406.251.000	867.929.256	3.538.321.744	19,70%
16	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	567.371.733	20,63%	2.661.996.000	368.031.881	13,83%	150.000.000	148.973.612	99,32%	5.562.628.000	1.084.377.226	4.478.250.774	19,49%
17	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	594.948.063	19,74%	2.496.770.000	415.664.758	16,65%	150.000.000	48.766.000	32,51%	5.660.150.000	1.059.378.821	4.600.771.179	18,72%
18	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	215.953.324	22,21%	1.225.857.000	168.175.349	13,72%	150.000.000	48.030.000	32,02%	2.348.371.000	432.158.673	1.916.212.327	18,40%
19	649025 KANWIL MALUKU UTARA (IMIGRASI)	-	-	-	1.462.670.000	260.248.884	17,79%	-	-	-	1.462.670.000	260.248.884	1.202.421.116	17,79%
20	649022 KANWIL MALUKU UTARA (SETJEN)	7.217.651.000	1.430.409.318	19,82%	5.917.838.000	953.306.089	16,11%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	2.383.715.407	11.056.163.593	17,74%
21	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	638.509.750	22,59%	5.700.213.000	1.101.972.156	19,33%	1.399.631.000	-	0,00%	9.926.119.000	1.740.481.906	8.185.637.094	17,53%
22	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	367.358.697	20,86%	2.070.896.000	265.941.651	12,84%	150.000.000	38.000.600	25,33%	3.982.205.000	671.300.948	3.310.904.052	16,86%
23	649023 KANWIL MALUKU UTARA (AHU)	-	-	-	2.031.284.000	302.080.454	14,87%	-	-	-	2.031.284.000	302.080.454	1.729.203.546	14,87%
24	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	587.140.033	20,33%	1.564.213.000	286.838.831	18,34%	5.916.050.000	2.200.000	0,04%	10.368.064.000	876.178.864	9.491.885.136	8,45%
TOTAL		40.412.276.000	8.552.825.231	21,16%	48.511.273.000	8.703.182.731	17,94%	9.544.236.000	1.276.580.089	13,38%	98.467.785.000	18.532.588.051	79.935.196.949	18,82%

sumber : <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

1 April 2022 pukul 09.16 WIT

4) Realisasi Anggaran periode Bulan April Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 30 APRIL 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	529.072.073	44,56%	834.381.000	369.995.000	44,34%	150.000.000	76.508.509	51,01%	2.171.796.000	975.575.582	1.196.220.418	44,92%
2	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	1.084.638.257	41,09%	1.507.204.000	503.182.693	33,39%	150.000.000	149.800.000	99,87%	4.296.919.000	1.737.620.950	2.559.298.050	40,44%
3	649028 DITJEN HAM	-	-	-	273.061.000	110.381.000	40,42%	-	-	-	273.061.000	110.381.000	162.680.000	40,42%
4	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	841.130.250	47,51%	1.826.908.000	433.835.943	23,75%	150.000.000	149.796.044	99,86%	3.747.451.000	1.424.762.237	2.322.688.763	38,02%
5	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	326.304.851	33,55%	1.225.857.000	415.447.791	33,89%	150.000.000	149.422.500	99,62%	2.348.371.000	891.175.142	1.457.195.858	37,95%
6	649030 BALITBANGHAM	-	-	-	235.670.000	86.932.450	36,89%	-	-	-	235.670.000	86.932.450	148.737.550	36,89%
7	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	359.130.404	51,73%	1.245.000.000	236.772.000	19,02%	150.000.000	149.734.881	99,82%	2.089.184.000	745.637.285	1.343.546.715	35,69%
8	649026 DITJEN KI	-	-	-	913.609.000	319.379.100	34,96%	-	-	-	913.609.000	319.379.100	594.229.900	34,96%
9	649022 SETJEN	7.217.651.000	2.394.732.765	33,18%	5.917.838.000	2.278.533.535	38,50%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	4.673.266.300	8.766.612.700	34,77%
10	649029 BPHN	-	-	-	1.199.068.000	394.408.500	32,89%	-	-	-	1.199.068.000	394.408.500	804.659.500	32,89%
11	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	534.742.522	37,71%	3.816.718.000	1.077.287.424	28,23%	148.400.000	148.395.000	100,00%	5.383.262.000	1.760.424.946	3.622.837.054	32,70%
12	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	786.864.788	41,21%	1.360.737.000	328.679.100	24,15%	150.000.000	-	0,00%	3.419.971.000	1.115.543.888	2.304.427.112	32,62%
13	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	1.106.886.716	38,07%	2.579.133.000	573.791.861	22,25%	145.765.000	145.485.936	99,81%	5.632.688.000	1.826.164.513	3.806.523.487	32,42%
14	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	1.018.847.682	37,04%	2.661.996.000	559.079.382	21,00%	150.000.000	148.973.612	99,32%	5.562.628.000	1.726.900.676	3.835.727.324	31,04%
15	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	1.043.027.399	34,61%	2.496.770.000	591.697.210	23,70%	150.000.000	48.766.000	32,51%	5.660.150.000	1.683.490.609	3.976.659.391	29,74%
16	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	1.264.626.798	33,88%	4.780.633.000	1.164.843.449	24,37%	130.000.000	129.339.016	99,49%	8.643.231.000	2.558.809.263	6.084.421.737	29,60%
17	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	705.017.992	25,89%	1.533.160.000	446.199.013	29,10%	150.000.000	149.859.000	99,91%	4.406.251.000	1.301.076.005	3.105.174.995	29,53%
18	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	623.095.842	35,38%	2.070.896.000	400.529.533	19,34%	150.000.000	149.464.235	99,64%	3.982.205.000	1.173.089.610	2.809.115.390	29,46%
19	649027 DITJEN PP	-	-	-	247.000.000	63.948.000	25,89%	-	-	-	247.000.000	63.948.000	183.052.000	25,89%
20	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	1.079.872.807	38,21%	5.700.213.000	1.378.619.708	24,19%	1.399.631.000	82.630.999	5,90%	9.926.119.000	2.541.123.514	7.384.995.486	25,60%
21	649025 DITJEN IMIGRASI	-	-	-	1.462.670.000	368.175.983	25,17%	-	-	-	1.462.670.000	368.175.983	1.094.494.017	25,17%
22	649024 DITJEN PEMASYARAKATAN	-	-	-	1.027.254.000	238.700.900	23,24%	-	-	-	1.027.254.000	238.700.900	788.553.100	23,24%
23	649023 DITJEN AHU	-	-	-	2.031.284.000	435.515.059	21,44%	-	-	-	2.031.284.000	435.515.059	1.595.768.941	21,44%
24	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	991.581.396	34,34%	1.564.213.000	399.021.949	25,51%	5.916.050.000	100.732.060	1,70%	10.368.064.000	1.491.335.405	8.876.728.595	14,38%
TOTAL		40.412.276.000	14.689.572.542	36,35%	48.511.273.000	13.174.956.583	27,16%	9.544.236.000	1.778.907.792	18,64%	98.467.785.000	29.643.436.917	68.824.348.083	30,10%

5) Realisasi Anggaran periode Bulan Mei Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 31 MEI 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	624.986.353	52,63%	834.381.000	462.365.000	55,41%	150.000.000	76.508.509	51,01%	2.171.796.000	1.163.859.862	1.007.936.138	53,59%
2	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	639.649.552	65,77%	1.225.857.000	554.299.717	45,22%	150.000.000	149.422.500	99,62%	2.348.371.000	1.343.371.769	1.004.999.231	57,20%
3	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	1.365.718.487	51,74%	1.507.204.000	627.182.736	41,61%	150.000.000	149.800.000	99,87%	4.296.919.000	2.142.701.223	2.154.217.777	49,87%
4	649028 DITJEN HAM	-	-	-	273.061.000	133.781.000	48,99%	-	-	-	273.061.000	133.781.000	139.280.000	48,99%
5	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	1.051.135.042	59,37%	1.826.908.000	605.607.352	33,15%	150.000.000	149.796.044	99,86%	3.747.451.000	1.806.538.438	1.940.912.562	48,21%
6	649030 BALITBANGHAM	-	-	-	235.670.000	105.532.450	44,78%	-	-	-	235.670.000	105.532.450	130.137.550	44,78%
7	649027 DITJEN PP	-	-	-	247.000.000	110.386.000	44,69%	-	-	-	247.000.000	110.386.000	136.614.000	44,69%
8	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	457.936.969	65,97%	1.245.000.000	293.442.000	23,57%	150.000.000	149.734.881	99,82%	2.089.184.000	901.113.850	1.188.070.150	43,13%
9	649022 SETJEN	7.217.651.000	2.903.435.603	40,23%	5.917.838.000	2.834.400.386	47,90%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	5.737.835.989	7.702.043.011	42,69%
10	649026 DITJEN KI	-	-	-	913.609.000	375.486.900	41,10%	-	-	-	913.609.000	375.486.900	538.122.100	41,10%
11	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	957.446.968	50,15%	1.360.737.000	382.194.600	28,09%	150.000.000	57.122.305	38,08%	3.419.971.000	1.396.763.873	2.023.207.127	40,84%
12	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	1.302.897.937	43,24%	2.496.770.000	804.404.985	32,22%	150.000.000	148.976.800	99,32%	5.660.150.000	2.256.279.722	3.403.870.278	39,86%
13	649029 BPHN	-	-	-	1.199.068.000	473.247.100	39,47%	-	-	-	1.199.068.000	473.247.100	725.820.900	39,47%
14	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	1.366.139.014	46,98%	2.579.133.000	709.269.260	27,50%	145.765.000	145.485.936	99,81%	5.632.688.000	2.220.894.210	3.411.793.790	39,43%
15	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	1.276.761.557	46,42%	2.661.996.000	715.259.597	26,87%	150.000.000	148.973.612	99,32%	5.562.628.000	2.140.994.766	3.421.633.234	38,49%
16	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	1.532.989.546	41,07%	4.780.633.000	1.626.790.143	34,03%	130.000.000	129.339.016	99,49%	8.643.231.000	3.289.118.705	5.354.112.295	38,05%
17	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	644.913.701	45,48%	3.816.718.000	1.245.850.679	32,64%	148.400.000	148.395.000	100,00%	5.383.262.000	2.039.159.380	3.344.102.620	37,88%
18	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	896.120.153	32,91%	1.533.160.000	621.526.767	40,54%	150.000.000	149.859.000	99,91%	4.406.251.000	1.667.505.920	2.738.745.080	37,84%
19	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	768.433.257	43,63%	2.070.896.000	585.378.208	28,27%	150.000.000	149.464.235	99,64%	3.982.205.000	1.503.275.700	2.478.929.300	37,75%
20	649025 DITJEN IMIGRASI	-	-	-	1.462.670.000	537.063.689	36,72%	-	-	-	1.462.670.000	537.063.689	925.606.311	36,72%
21	649023 DITJEN AHU	-	-	-	2.031.284.000	704.099.759	34,66%	-	-	-	2.031.284.000	704.099.759	1.327.184.241	34,66%
22	649024 DITJEN PEMASYARAKATAN	-	-	-	1.027.254.000	335.688.900	32,68%	-	-	-	1.027.254.000	335.688.900	691.565.100	32,68%
23	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	1.293.790.158	45,78%	5.700.213.000	1.805.126.008	31,67%	1.399.631.000	82.630.999	5,90%	9.926.119.000	3.181.547.165	6.744.571.835	32,05%
24	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	1.210.030.409	41,90%	1.564.213.000	485.966.298	31,07%	5.916.050.000	288.724.170	4,88%	10.368.064.000	1.984.720.877	8.383.343.123	19,14%
TOTAL		40.412.276.000	18.292.384.706	45,26%	48.511.273.000	17.134.349.534	35,32%	9.544.236.000	2.124.233.007	22,26%	98.467.785.000	37.550.967.247	60.916.817.753	38,14%

6) Realisasi Anggaran periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2022

PENYERAPAN ANGGARAN
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 30 JUNI 2022

No	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total			
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	Sisa	%
1	632712 RUPBASAN TERNATE	1.187.415.000	716.924.178	60,38%	834.381.000	544.310.000	65,24%	150.000.000	147.770.509	98,51%	2.171.796.000	1.409.004.687	762.791.313	64,88%
2	352614 LPKA TERNATE	2.639.715.000	1.648.777.674	62,46%	1.507.204.000	751.279.842	49,85%	150.000.000	149.800.000	99,87%	4.296.919.000	2.549.857.516	1.747.061.484	59,34%
3	649027 DITJEN PP	-	-	-	247.000.000	143.786.000	58,21%	-	-	-	247.000.000	143.786.000	103.214.000	58,21%
4	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.770.543.000	1.255.918.946	70,93%	1.826.908.000	760.150.486	41,61%	150.000.000	149.796.044	99,86%	3.747.451.000	2.165.865.476	1.581.585.524	57,80%
5	684003 RUTAN WEDA	972.514.000	639.649.552	65,77%	1.225.857.000	554.299.717	45,22%	150.000.000	149.422.500	99,62%	2.348.371.000	1.343.371.769	1.004.999.231	57,20%
6	649028 DITJEN HAM	-	-	-	273.061.000	154.721.000	56,66%	-	-	-	273.061.000	154.721.000	118.340.000	56,66%
7	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	694.184.000	553.331.614	79,71%	1.245.000.000	452.024.470	36,31%	150.000.000	149.734.881	99,82%	2.089.184.000	1.155.090.965	934.093.035	55,29%
8	649029 BPHN	-	-	-	1.199.068.000	630.195.100	52,56%	-	-	-	1.199.068.000	630.195.100	568.872.900	52,56%
9	649023 DITJEN AHU	-	-	-	2.031.284.000	1.025.293.759	50,48%	-	-	-	2.031.284.000	1.025.293.759	1.005.990.241	50,48%
10	649030 BALITBANGHAM	-	-	-	235.670.000	118.922.450	50,46%	-	-	-	235.670.000	118.922.450	116.747.550	50,46%
11	649025 DITJEN IMIGRASI	-	-	-	1.462.670.000	735.618.379	50,29%	-	-	-	1.462.670.000	735.618.379	727.051.621	50,29%
12	649026 DITJEN KI	-	-	-	913.609.000	457.736.900	50,10%	-	-	-	913.609.000	457.736.900	455.872.100	50,10%
13	649022 SETJEN	7.217.651.000	3.397.408.445	47,07%	5.917.838.000	3.322.746.576	56,15%	304.390.000	-	0,00%	13.439.879.000	6.720.155.021	6.719.723.979	50,00%
14	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	3.732.598.000	1.810.436.716	48,50%	4.780.633.000	2.378.979.839	49,76%	130.000.000	129.339.016	99,49%	8.643.231.000	4.318.755.571	4.324.475.429	49,97%
15	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	2.750.632.000	1.534.863.536	55,80%	2.661.996.000	1.092.380.887	41,04%	150.000.000	148.973.612	99,32%	5.562.628.000	2.776.218.035	2.786.409.965	49,91%
16	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	1.418.144.000	749.236.880	52,83%	3.816.718.000	1.788.882.293	46,87%	148.400.000	148.395.000	100,00%	5.383.262.000	2.686.514.173	2.696.747.827	49,90%
17	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.907.790.000	1.628.338.075	56,00%	2.579.133.000	1.018.486.433	39,49%	145.765.000	145.485.936	99,81%	5.632.688.000	2.792.310.444	2.840.377.556	49,57%
18	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	1.761.309.000	908.283.288	51,57%	2.070.896.000	886.545.737	42,81%	150.000.000	149.464.235	99,64%	3.982.205.000	1.944.293.260	2.037.911.740	48,82%
19	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.013.380.000	1.559.608.172	51,76%	2.496.770.000	1.049.921.271	42,05%	150.000.000	148.976.800	99,32%	5.660.150.000	2.758.506.243	2.901.643.757	48,74%
20	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	1.909.234.000	1.125.904.883	58,97%	1.360.737.000	444.899.100	32,70%	150.000.000	70.297.980	46,87%	3.419.971.000	1.641.101.963	1.778.869.037	47,99%
21	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.723.091.000	1.082.549.396	39,75%	1.533.160.000	813.952.830	53,09%	150.000.000	149.859.000	99,91%	4.406.251.000	2.046.361.226	2.359.889.774	46,44%
22	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	2.826.275.000	1.506.723.687	53,31%	5.700.213.000	2.539.198.837	44,55%	1.399.631.000	424.585.901	30,34%	9.926.119.000	4.470.508.425	5.455.610.575	45,04%
23	649024 DITJEN PEMASYARAKATAN	-	-	-	1.027.254.000	419.244.900	40,81%	-	-	-	1.027.254.000	419.244.900	608.009.100	40,81%
24	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	2.887.801.000	1.418.959.921	49,14%	1.564.213.000	774.758.926	49,53%	5.916.050.000	402.001.395	6,80%	10.368.064.000	2.595.720.242	7.772.343.758	25,04%
TOTAL		40.412.276.000	21.536.914.963	53,29%	48.511.273.000	22.858.335.732	47,12%	9.544.236.000	2.663.902.809	27,91%	98.467.785.000	47.059.153.504	51.408.631.496	47,79%

7) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

NO	KANWIL	TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%
1	SULAWESI SELATAN	360.840.394.000	173.967.548.928	48,21%
2	SUMATERA BARAT	200.900.139.000	96.184.842.936	47,88%
3	MALUKU UTARA	98.467.785.000	47.059.153.504	47,79%
4	LAMPUNG	245.197.582.000	116.710.197.525	47,60%
5	SUMATERA SELATAN	324.657.162.000	154.179.718.364	47,49%
6	DI YOGYAKARTA	155.454.253.000	72.940.787.149	46,92%
7	GORONTALO	73.892.163.000	34.362.017.161	46,50%
8	BALI	238.227.546.000	109.865.262.596	46,12%
9	BENGKULU	109.290.163.000	49.585.896.530	45,37%
10	SULAWESI TENGAH	160.291.315.000	72.482.105.521	45,22%
11	JAWA BARAT	682.692.442.000	307.961.017.221	45,11%
12	SULAWESI TENGGARA	144.588.703.000	64.980.098.590	44,94%
13	NUSA TENGGARA TIMUR	190.688.170.000	85.409.712.012	44,79%
14	DKI JAKARTA	602.683.204.000	269.510.257.978	44,72%
15	KALIMANTAN BARAT	245.427.212.000	109.487.544.217	44,61%
16	MALUKU	125.717.262.000	55.910.878.094	44,47%
17	BANGKA BELITUNG	110.823.084.000	49.137.075.518	44,34%
18	BANTEN	348.676.668.000	152.911.400.288	43,85%
19	PAPUA	169.383.615.000	73.653.903.862	43,48%
20	JAWA TIMUR	766.664.967.000	328.988.908.463	42,91%
21	SULAWESI BARAT	85.183.257.000	36.299.141.100	42,61%
22	BANDA ACEH	304.383.786.000	129.455.108.910	42,53%
23	JAWA TENGAH	623.905.749.000	264.170.412.753	42,34%
24	SUMATERA UTARA	772.001.109.000	322.613.777.722	41,79%
25	KALIMANTAN TIMUR	324.036.171.000	132.134.882.537	40,78%
26	KALIMANTAN TENGAH	190.124.043.000	77.012.938.412	40,51%
27	KALIMANTAN SELATAN	248.916.755.000	100.751.568.379	40,48%
28	NUSA TENGGARA BARAT	203.207.528.000	80.846.298.375	39,79%
29	SULAWESI UTARA	192.235.829.000	75.930.224.124	39,50%
30	KEPULAUAN RIAU	260.711.221.000	101.491.953.007	38,93%
31	JAMBI	201.306.741.000	77.657.341.611	38,58%
32	RIAU	378.771.935.000	141.941.322.204	37,47%
33	PAPUA BARAT	133.312.390.000	46.475.372.995	34,86%

8) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode Semester I, yaitu:

- Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara senilai Rp47.059.153.504 dari total PAGU Anggaran Rp98.467.785.000, dengan persentase 47,79%.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi anggaran di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menempati peringkat ketiga setelah Kantor Wilayah Sulawesi Selatan (48,21%) dan Kantor Wilayah Sumatera Barat (47,88%).
- Realisasi anggaran untuk 9 DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara senilai Rp10.405.673.509 dari total PAGU Anggaran Rp20.829.495.000, dengan persentase 49,96%.
- Sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, target realisasi anggaran untuk periode Semester I adalah 50%. Persentase ini merupakan persentase kumulatif dari realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Berdasarkan hasil rekapitulasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per 30 Juni 2022, satuan kerja dengan realisasi tertinggi dicapai oleh Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate (64,88%). Kemudian, dua satuan kerja dengan nilai realisasi terendah yaitu, Direktorat Jenderal Pemasarakatan (40,81%), dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate (25,04%).
- Satuan kerja Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate memiliki PAGU sebesar Rp2.171.796.000 dengan persentase penyerapan sebesar Rp1.409.004.687 (64,88%). Penyerapan Anggaran pada setiap jenis belanja pada RUPBASAN Ternate telah melebihi target yang ditentukan (50%). Ini merupakan pencapaian yang sangat baik atas realisasi anggaran satuan kerja.
- Satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki PAGU sebesar Rp1.027.254.000 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp419.244.900 (40,81%). Dibandingkan dengan 9 DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, hanya satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan tidak mencapai target penyerapan semester I.
- Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate memiliki total PAGU sebesar Rp10.368.064.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.595.720.242 (25,04%). Realisasi belanja modal yang baru mencapai 6,08% membuat penyerapan anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate belum maksimal.

9) Faktor yang menyebabkan terjadinya kendala yang dihadapi:

- Realisasi belanja pada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Ternate sudah sangat baik, namun diharapkan tetap memerhatikan anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) agar tidak terdapat PAGU Minus dan Deviasi Halaman III DIPA yang lebih dari 5%.

- Realisasi belanja barang pada satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan belum mencapai target minimum penyerapan sebesar 40,81%. Hal ini dikarenakan terdapat banyak PAGU yang masih diblokir, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran *stagnan*. Belum ada informasi lebih lanjut dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan terkait buka blokir anggaran. Jika belum dilakukan blokir, maka satuan kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan memaksimalkan kegiatan hingga Triwulan III.
- Realisasi belanja modal pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate memiliki *gap* yang cukup besar terhadap target yang ditentukan. PAGU belanja modal pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate sebesar Rp5.916.050.000, sementara realisasinya hanya 6,80% atau sebesar Rp402.001.396. Belanja modal ini terkait dengan penyelesaian pembangunan gedung/bangunan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Apabila proses pelaksanaan pembangunan gedung/bangunan telah dimulai, diharapkan penyerapan anggaran pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Ternate dapat mencapai target yang ditentukan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka perlu dilakukan langkah perbaikan berupa rencana tindak lanjut, yaitu:

- a. Setiap satuan kerja harus memerhatikan penyerapan anggaran per jenis belanja dan mendukung belanja berkualitas melalui peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun.
- b. Satuan kerja diharapkan melakukan penyusunan rencana kegiatan periode Triwulan III kemudian melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA.
- c. Sesuai dengan PER-5/PB/2022, batas waktu pemutakhiran RPD Halaman III DIPA untuk periode Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III tahun 2022 adalah tanggal 14 Juli 2022.
- d. RPD Halaman III DIPA bulan Januari-Juni sesuai dengan realisasi anggaran per jenis belanja. RPD Halaman III DIPA bulan Juli-September sesuai rencana belanja per jenis belanja, dengan memerhatikan target realisasi anggaran triwulan III, yaitu: Belanja Pegawai sebesar 75%, Belanja Barang sebesar 70%, dan Belanja Modal sebesar 70%.

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka perlu segera dilaksanakan tindak lanjut pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

E. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran periode Triwulan II Tahun Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan diharapkan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian untuk maklum.



Dibuat di Ternate
pada tanggal 5 Juli 2022
Kepala Divisi Administrasi

Andi Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002